



## Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada SKPD di Kabupaten Indragiri Hilir)

JE-Vol.27-No.4-2019-pp.370-385

Herda Nengsy<sup>1\*</sup>, Sarimauliana<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, Indonesia

\*Email: herdanengsy@gmail.com

---

### ABSTRACT

This study aims to determine and empirically test the factors that influence the quality of information on the financial statements of local governments in Indragiri Hilir Regency, namely the influence of human resources, utilization of information technology and internal control systems. The population in this study is the apparatus / staff of the financial department that carries out the accounting and management functions of the Regional Government Financial Statements. The sampling technique is done by using the Purposive Sampling method with the apparatus / staff criteria of the finance department that carries out the function of accounting and financial statement management with a work duration of more than one year with 93 respondents. The technique of data collection is done by survey method by distributing questionnaires directly to respondents. This study uses multiple linear regression data analysis methods with the results of human resource research affect the quality of information Indragiri Hilir district government financial report, the use of information technology does not affect the quality of information Indragiri Hilir Regional Government Financial Report, and the internal control system affects the quality information on Indragiri Hilir District Government Financial Statements.

**Keywords:** Human Resources, Utilization of Information Technology and Internal Control Systems, Quality of Information on Financial Statements.

---

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu pengaruh sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern. Populasi dalam penelitian ini adalah aparatur/staff bagian keuangan yang melaksanakan fungsi akuntansi dan pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode Purposive Sampling dengan kriteria aparatur/staff bagian keuangan yang melaksanakan fungsi akuntansi dan pengelolaan laporan keuangan dengan lama bekerja lebih dari satu tahun dengan jumlah responden sebanyak 93 responden. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode Survey dengan menyebarkan langsung kuesioner kepada responden. Penelitian ini menggunakan metode analisis data regresi linear berganda dengan hasil penelitian sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

**Kata kunci:** Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern, Kualitas Informasi Laporan Keuangan.

---

## 1. PENDAHULUAN

Sektor publik atau sektor pemerintahan memiliki perangkat kerja daerah yang bertindak sebagai sarana dalam pelaksanaan fungsi, tujuan dan aktivitas sektor publik agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Satuan kerja ini disebut dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). SKPD mempunyai tugas pokok melaksanakan/mengkoordinasikan kewenangan pemerintah yang telah dilimpahkan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah seperti penyusunan program kerja dan kegiatan, pelayanan dan ketertiban umum, serta administrasi dan keuangan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa satuan kerja perangkat daerah terdiri dari SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya, SKPD berperan sebagai pengguna anggaran yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Anggaran yang digunakan untuk menjalankan program kerja SKPD akan dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan, sebagaimana dijelaskan dalam BAB XI Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Laporan keuangan pemerintahan ditujukan untuk memenuhi akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan APBN/APBD. Tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas dan transparansi keuangan pemerintahan meningkat seiring dengan kemajuan sistem keuangan modern. Pemerintah diatur untuk memberikan informasi keuangan daerah melalui situs resmi pemerintahan yang bisa diakses melalui internet sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Pemerintah harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Menurut Mardiasmo (2009), publik memiliki hak-hak dasar terhadap pemerintah yakni; 1) Hak untuk tahu (*Right To Know*); 2) Hak untuk diberi informasi (*Right To Be Informed*); serta 3) Hak untuk didengar aspirasinya (*Right To Be Heard To Be Listened To*). Hal ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah sesuai dengan amanah yang telah diberikan. Mengingat pentingnya peran laporan keuangan bagi suatu instansi, maka dibutuhkan informasi yang andal dan berkualitas sehingga mudah untuk dipahami oleh pengguna laporan keuangan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu: (1) Relevan; (2) Andal; (3) Dapat dibandingkan; (4) Dapat dipahami. Pemerintah diharapkan mampu memenuhi transparansi dan akuntabilitasnya dengan memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah seperti yang telah tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Jika pemerintah belum mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka akan ada potensi-potensi kerugian negara, kecurangan (*fraud*), kesalahsajian material (*error*), ketidakefisienan serta ketidakefektifan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan data Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS I) tahun 2019, dari 542 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2018, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini audit wajar tanpa pengecualian (WTP) pada 443 laporan keuangan (82%), wajar dengan pengecualian (WDP) pada 86 laporan keuangan (16%) dan tidak memberikan pendapat (TMP) pada 13 laporan keuangan (2%). Fenomena ini, menandakan masih ada 18% atau sebanyak 109 laporan keuangan pada instansi pemerintah yang belum menerapkan standar-standar pelaporan akuntansi dan memenuhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah diseluruh indonesia belum memenuhi 100% wajar tanpa pengecualian (WTP). IHPS untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau selama 5 tahun, mulai dari tahun 2014 sampai tahun 2018 sebagaimana tersaji pada Tabel 1 berikut :

**Tabel 1: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS) Tahun 2019**

Entitas Pemerintah Daerah	Opini Tahun 2014	Opini Tahun 2015	Opini Tahun 2016	Opini Tahun 2017	Opini Tahun 2018
Kabupaten Indragiri Hilir	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPK (2019)

Dari hasil pemeriksaan tersebut, pemberian opini wajar dengan pengecualian (WDP) pada tahun 2014-2015 dapat mengartikan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten Indragiri Hilir masih terdapat kelemahan dan belum mampu untuk memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah. Pada tiga tahun terakhir yaitu tahun 2016-2018, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah mendapat predikat opini audit wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Namun, hal tersebut belum menutupi kemungkinan masih terdapat kendala dalam pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Mengingat terjadinya beberapa kali perubahan pada Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 mengenai Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta perubahan yang terjadi pada Peraturan Bupati tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Perubahan pada Peraturan Bupati tersebut menandakan peraturan yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah masih perlu disempurnakan.

Perubahan pada peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan perubahan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah tentu akan menimbulkan adanya peraturan baru. Peraturan baru tersebut memerlukan adaptasi dari sumber daya manusia yang menjalankan fungsi sebagai pengelola laporan keuangan pemerintah daerah. Adaptasi dapat berupa pemberian pelatihan, seminar dan sosialisasi terhadap peraturan baru yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah karena salah satu faktor utama dalam penyusunan laporan keuangan yang dapat mempengaruhi kualitas informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah tersebut adalah pemahaman akuntansi pemerintahan dari sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimaksud dalam hal ini adalah aparatur/*staff* yang mengelola keuangan pemerintahan.

Selain sumber daya manusia, terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah yaitu teknologi informasi. Lajunya perkembangan teknologi yang semakin canggih menjadikan pemanfaatan teknologi informasi akan sangat mendukung terlaksananya pengelolaan laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan penerapan aplikasi yang ditujukan sebagai media *database* informasi dalam instansi pemerintahan yang bersangkutan diharapkan akan membantu pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintah, perumusan kebijakan daerah, dan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKDA), Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Dengan diterapkannya aplikasi ini pengelolaan laporan keuangan menjadi lebih efektif dan efisien sehingga informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintahan daerah lebih akurat dan berkualitas.

Laporan keuangan pemerintah daerah dikatakan berkualitas apabila laporan keuangan telah disusun sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan pelanggaran dalam pengelolaan keuangan pemerintahan, pemerintah membentuk badan pengawas yang ditugaskan untuk memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintahan, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintahan. Dengan terlaksananya sistem pengendalian intern yang ketat dan memadai dalam upaya penerapan peraturan dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, pemerintah diharapkan dapat menyajikan informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang benar dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai berikut *agency relationship as a contract under which one or more person (the principals) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent*. Artinya, hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (*principal*) melibatkan orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu pelayanan/jasa atas nama *principal* dengan pendelegasian wewenang kepada agen untuk membuat keputusan. Hubungan keagenan tidak terlepas dari permasalahan yang terjadi pada proses pengimplementasian kontrak pendelegasian wewenang antara agen dan *principal*. Eisenhardt (1989) menjelaskan bahwa permasalahan dalam hubungan keagenan muncul karena; (a) prinsipal dan agen memiliki tujuan yang berbeda serta (b) prinsipal tidak dapat menentukan apakah agen telah bertindak dengan tepat. Untuk itu, perlu adanya akuntabilitas dari pihak agen untuk meyakinkan *principal* (publik) bahwa wewenang yang diberikan telah dilaksanakan sebaik mungkin.

### 2.2. Tata Kelola yang baik (*Good Governance*)

World Bank memberikan definisi *governance* sebagai *the way state power is used in managing economic and social resource for development of society*. Sementara itu, *United National Development Program* (UNDP) mendefinisikan *governance* sebagai *the exercises of political, economic, and administrative authority to manage a nation's affair at all levels*. Dalam hal ini, World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi dan administratif dalam pengelolaan negara. *Political governance* mengacu pada pembuatan kebijakan (*policy/strategy formulation*). *Economic governance* mengacu pada proses pembuatan keputusan dibidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup. *Administrative governance* mengacu pada sistem implementasi kebijakan (Mardiasmo, 2009).

Menurut Mardiasmo (2009), terdapat beberapa karakteristik *good governance* berdasarkan UNDP (*United Nation Development Program*), meliputi : *participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency and effectiveness, accountability, strategic vision*. Pemerintah dituntut untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat (*equity*), termasuk memberikan kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik (*transparency*), memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap (*responsive*) serta lebih mengutamakan kepentingan masyarakat (*consensus orientation*). Hal ini dilakukan untuk membantu pemerintah mencapai tata kelola yang baik dalam kepemimpinannya, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pengelolaan sumber daya dengan efektif dan efisien (*effectiveness and efficiency*) untuk membangun visi yang memadai bagi masa depan bangsa dan negara (*strategic vision*). Pemerintah dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan segala aktivitas ketatanegaraan (*accountability*) guna mempertahankan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan dan sebagai bentuk dari transparansi dalam mengelola ketatanegaraan. Berdasarkan keterangan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2018, laporan keuangan ini terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

### 2.3. Laporan Keuangan Pemerintahan

Menurut Bastian (2006), laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Menurut Mardiasmo (2009), laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen paling penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dari definisi tersebut disimpulkan bahwa laporan keuangan dalam sektor publik merupakan salah satu perwujudan dari akuntabilitas dan transparansi atas transaksi-transaksi

keuangan yang dilakukan oleh pemerintahan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa *principal* (publik) memberikan tugas kepada *agen* (pemerintah), salah satunya dalam bentuk pengelolaan keuangan negara yang dihasilkan dari Pendapatan Pajak, Pendapatan Bukan Pajak dan Penerimaan Hibah. Seluruh bentuk penerimaan dan pengeluaran negara tercantum dalam laporan APBN yang digunakan untuk melaksanakan fungsi pelayanan umum kepada masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut akan dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diperiksa (*audited*). Laporan keuangan pemerintah yang telah diperiksa disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*anggranary reports*), dan laporan finansial. Berdasarkan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2019), laporan keuangan tersebut memiliki komponen-komponen sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran, menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
2. Laporan Saldo Anggaran Lebih, menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Neraca, menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
4. Laporan Operasional, menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
5. Laporan Arus Kas, menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.
6. Laporan Perubahan Ekuitas, menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
7. Catatan Atas Laporan Keuangan, meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

#### 2.4. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan yang telah disajikan oleh pemerintahan akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menentukan kualitas dari laporan keuangan tersebut apakah telah memenuhi syarat kualitatif laporan keuangan pemerintah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pengguna laporan keuangan mengambil suatu kebijakan atau keputusan. Informasi yang diberikan dalam laporan keuangan tersebut harus memiliki kualitas agar tersampaikan maksud dan tujuannya dengan benar kepada pengguna laporan keuangan dan terhindar dari bias serta kekeliruan. *Statement of Financial Accounting Concept* (SFAC) diterbitkan oleh *Financial Accounting Standards Board* (FASB) periode Tahun 1976-1985 secara bertahap. SFAC Nomor 2 Tahun 1980 tentang *Qualitative Characteristics of Accounting Information* berisikan karakteristik kualitas informasi yang harus dipenuhi dalam pelaporan keuangan. Karakteristik kualitatif berdasarkan SFAC Nomor 2 tersebut diantaranya:

1. *Relevance*
  - a. *Predictive Value*
  - b. *Feedback Value*
  - c. *Timelines*
2. *Reliability*

- a. *Representational Faithfulness*
- b. *Verifiability*
- c. *Neutrality*
3. *Comparability*
  - a. *Consistency*
4. *Understandability*

Menurut Yeny & Poputra (2016) karakteristik kualitatif tersebut diadopsi ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 berdasarkan SFAC menjadi empat karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Empat karakteristik tersebut yaitu; (a) Relevan; (b) Andal; (c) Dapat dibandingkan; (d) Dapat dipahami. Laporan keuangan juga harus memiliki informasi yang relevan sebagai pertimbangan dalam prosen pengambilan keputusan. Menurut Bastian (2006), informasi memiliki kualitas yang relevan apabila informasi tersebut mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dalam menilai peristiwa masa lalu dan masa kini, atau memperkirakan masa depan. Dengan begitu pengguna laporan keuangan dapat membandingkan informasi yang disajikan antar periode tertentu untuk mengidentifikasi, menganalisis serta mengevaluasi kinerja keuangan. Informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan harus memiliki kualitas yang andal. Maksudnya, informasi yang disampaikan terbebas dari kesalahan material dalam penyusunannya serta penyalahartian maksud dan tujuan dari informasi tersebut sehingga laporan keuangan yang disajikan dapat dengan mudah dipahami. Apabila pemerintah telah mampu memenuhi karakteristik kualitatif dalam penyusunan laporan keuangan tersebut, maka pemerintah telah mampu mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan laporan keuangan pemerintah daerah.

## 2.5. Sumber Daya Manusia

Menurut Marnis dan Priyono (2008), sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Menurut Taufiqurokhman (2009), sumber daya manusia merupakan orang yang bekerja dalam suatu organisasi yang sering pula disebut karyawan. SDM merupakan aset paling berharga dalam perusahaan, tanpa manusia maka sumber daya perusahaan tidak akan dapat menghasilkan laba atau menambah nilainya sendiri. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan bentuk dari sumber daya manusia dalam organisasi pemerintahan dimana kemampuan dan keterampilan yang dimiliki individu tersebut sangat mempengaruhi keefektifan organisasi dalam mencapai tujuan. Sebagaimana dijelaskan dalam teori Mathis & Jackson (2001), yang mengatakan bahwa tingkat efektivitas manajemen sumber daya manusia dipandang turut mempengaruhi kinerja suatu organisasi, sebesar atau sekecil apapun organisasi tersebut.

## 2.6. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Aziz (2012), teknologi informasi didefinisikan sebagai suatu teknologi yang berfungsi untuk menghasilkan, menyimpan, mengolah dan menyebarkan informasi tersebut dengan berbagai bentuk media dan format (*image, suara, text, motion picture, dsb*). Suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik sebagaimana tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Teknologi yang dimanfaatkan dengan baik oleh pegawai yang mengelola Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan membantu tercapainya laporan keuangan yang berkualitas sehingga mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Untuk itu diterapkan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Sistem Informasi Keuangan Daerah merupakan: Sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, SIKD berfungsi sebagai salah satu bentuk akuntabilitas pemerintah melalui informasi keuangan yang diberikan kepada masyarakat. Selain SIKD, sistem yang dapat membantu pengelolaan keuangan pemerintahan adalah SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) yang berfungsi untuk meningkatkan efektifitas bidang pengelolaan keuangan daerah dan SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) yang berfungsi sebagai penyedia database mengenai informasi daerah yang bersangkutan. Dengan adanya penerapan ketiga sistem informasi tersebut, maka pengelolaan keuangan pemerintah daerah akan semakin mudah, dan informasi yang disajikan lebih akurat serta tepat waktu sehingga akan membantu dalam pemenuhan karakteristik kualitatif informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

## 2.7. Sistem Pengendalian Intern

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan menjelaskan bahwa sistem pengendalian intern adalah Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern berperan sebagai pengawas pengelolaan keuangan daerah agar menjalankan proses pengelolaan dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Instansi pemerintahan memiliki badan pengawas yang ditugaskan untuk memantau, mengaudit, mereview dan mengevaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menjelaskan fungsi badan/instansi pemerintahan sebagai berikut :

1. Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP), adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
2. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga.
3. Inspektorat Provinsi adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur.
4. Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota.
5. Kementerian Negara adalah organisasi dalam Pemerintahan Republik Indonesia yang dipimpin oleh menteri untuk melaksanakan tugas dalam bidang tertentu.
6. Lembaga adalah organisasi non-kementerian negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Instansi Pemerintah adalah unsur penyelenggara pemerintahan pusat atau unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Bentuk dari pengendalian tersebut dapat berupa penerapan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berguna untuk menghindari penyimpangan tugas dan fungsi oleh pegawai instansi tersebut, serta membantu pendisiplinan terhadap pegawai dengan pemberian sanksi apabila terjadi suatu pelanggaran dalam pelaksanaan fungsi dan tugas. Selain itu, pemisahan wewenang dan pembatasan akses dapat menjadi bentuk pengendalian agar terhindarnya tumpang tindih pelaksanaan tugas dan agar

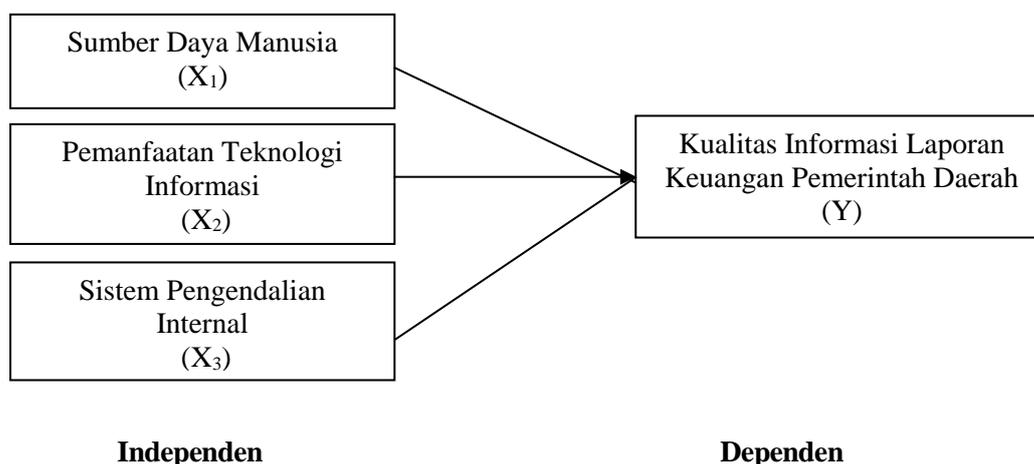
terlaksanakannya mekanisme *check and balance* dalam tata kelola pemerintahan. Pengendalian terhadap informasi yang bersangkutan dengan pengelolaan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan menyediakan *database* arsip dan dokumen dengan menggunakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SKID), Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIKPD) atau Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) untuk mencegah hilangnya data-data penting yang sewaktu-waktu akan dibutuhkan.

Bentuk pengendalian tersebut didasarkan pada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah sehingga memiliki kekuatan hukum. Dalam pengelolaan keuangan daerah terdapat Standar Akuntansi Pemerintahan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Untuk mendukung terlaksanakannya pengelolaan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut, dibutuhkan komitmen pimpinan yang kuat agar mampu menekankan kepada tenaga kerjanya tentang peraturan dan ketentuan yang berlaku sehingga prosedur terlaksana dengan benar dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi karakteristik kualitatif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

### 2.8. Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dalam pasal 32 menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut disusun oleh suatu komite yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah di Indonesia (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005). Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan disusun agar menjadi pedoman dalam pengelolaan dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah. Untuk dapat menerapkan SAP dengan sepenuhnya maka dibutuhkan pengendalian intern yang akan mendukung SAP dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memperkuat keyakinan masyarakat kepada kinerja pemerintahan.

**Gambar 1: Kerangka Pemikiran Penelitian**



## 3. DATA DAN METODOLOGI

### 3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada 33 Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dengan waktu penelitian selama 3 (tiga) bulan mulai dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2019. Populasi dalam penelitian ini meliputi aparatur/staff bagian keuangan yang melaksanakan fungsi akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pada 33 Satuan Kerja

Perangkat Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir di luar SKPD Kecamatan. Daftar SKPD yang menjadi populasi pada penelitian ini tersaji pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2: Daftar SKPD**

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
1	Sekretariat Daerah
2	Sekretariat DPRD
3	Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Badan Pendapatan Daerah
7	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11	Dinas Kesehatan
12	Dinas Katahanan Pangan
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
15	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
16	Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
18	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
20	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
21	Dinas Pendidikan
22	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
23	Dinas Perhubungan
24	Dinas Perikanan
25	Dinas Perkebunan
26	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
27	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
28	Dinas Sosial
29	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perternakan
30	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
31	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
32	Satuan Polisi Pamong Praja
33	Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan

**Sumber** : Data Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir (2019)

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut . Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013). Sampel pada penelitian ini adalah aparatur/staff bagian keuangan yang memenuhi kriteria Aparatur/staff yang melaksanakan fungsi akuntansi/tatausaha keuangan dan penyusunan laporan keuangan dan Memiliki lama bekerja minimal 1 tahun. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Peneliti turun langsung ke objek penelitian untuk menyebarkan kusioner kepada masing-masing SKPD yang telah ditentukan hingga kusioner tersebut dikembalikan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian berasal dari literatur jurnal dan buku-buku yang relevan dengan penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Analisis Regresi Linear Berganda (*Multiple Regression Analysis*)

menggunakan aplikasi SPSS (*Statistical Package for the Social Sciens*) versi 26. Pengujian juga termasuk validitas dan realibilitas data, serta pengujian hipotesa.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 4.1. Deskripsi Responden

Dari 33 SKPD yang menjadi objek penelitian ini, keseluruhan SKPD telah mengembalikan kuesioner yang diberikan dengan jumlah 143 kuesioner (87%) dari 165 kuesioner yang disebarkan. Namun, terdapat 50 kuesioner (35%) yang tidak diisi lengkap sehingga total data kuesioner yang dapat diolah adalah sebanyak 93 kuesioner (65%).Tingkat pengembalian responden (*Response rate*) dalam penelitian ini cukup tinggi yaitu seberar 87% , tingginya *response rate* ini disebabkan oleh penyebaran kuesioner yang dilakukan secara langsung sedangkan kuesioner yang tidak dikembalikan disebabkan oleh kesibukan aparatur/staff bagian keuangan yang menjadi responden dalam penelitian ini. Untuk demografi responden dilihat dari sisi usia terdapat sebanyak 26 responden atau 28% responden yang berada dalam rentang usia 20-30 tahun, kemudian sebanyak 39 responden atau 42% responden berada dalam rentang usia 31-40 tahun, sebanyak 14 responden atau 15% responden berada dalam rentang usia 41-50 tahun, dan sebanyak 14 responden atau 15% responden berusia diatas 50 tahun. Hal ini mengartikan bahwa sebagian besar responden atau aparatur/staff bagian akuntansi dan pengelola laporan keuangan masih berada dalam usia produktif.

Dari segi jenis kelamin, pria sebanyak 43 responden (46%) dan responden dengan jenis kelamin wanita sebanyak 50 responden (54%). Hal tersebut mengartikan bahwa sebagian besar responden atau aparatur/staff bagian akuntansi dan pengelola laporan keuangan berjenis kelamin wanita. Dilihat dari sisi lama bekerja, aparatur/staff bidang akuntansi dan pengelola laporan keuangan sebagian besar telah bekerja selama lebih dari 5 tahun, yaitu sebanyak 54 responden (58%), dan responden yang bekerja selama 1-5 tahun sebanyak 39 responden (42%). Pendidikan terakhir aparatur/staff bagian akuntansi dan pengelola laporan keuangan didominasi oleh sarjana yaitu sebanyak 59 responden (63%). Lalu disusul oleh responden yang berpendidikan megister yaitu sebanyak 15 responden (16%), lalu responden yang berpendidikan diploma yaitu sebanyak 10 responden (11%) dan responden dengan tingkat pendidikan terakhir paling rendah adalah responden dengan pendidikan terakhir SMA sederajat yaitu sebanyak 9 responden (10%).

##### 4.2 Statistik Deskriptif

**Tabel 3: Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviasi
Sumber daya manusia	93	19	35	28.45	3.188
Pemanfaatan teknologi informasi	93	18	30	26.46	2.577
Sistem Pengendalian Intern	93	15	25	20.86	2.140
Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	93	34	55	45.46	4.285
Valid N ( <i>listwise</i> )	93				

Sumber : Data Olahan SPSS Versi 26 (2019)

Berdasarkan Tabel 3 dapat disimpulkan bahwa 93 sampel setiap variabel pada penelitian ini telah memenuhi standar normal, hal ini diketahui berdasarkan nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan nilai *mean* sehingga data dinyatakan normal.

##### 4.3. Uji Validitas

Pengambilan keputusan dalam uji validitas dilakukan dengan cara membandingkan nilai *correlation item-total correlation* dengan hasil perhitungan r tabel. Jika r hitung > r tabel dengan  $\alpha = 0.05$  maka butir pertanyaan atau indikator dinyatakan valid. Hasil uji validitas dari masing-masing

variabel dengan tingkat signifikansi 0.05 dari *degree of freedom* (df) = n-2, tersaji dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 4: Hasil Uji Validitas Sumber Daya Manusia**

Item Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
1	0.569	0.204	VALID
2	0.649	0.204	VALID
3	0.591	0.204	VALID
4	0.764	0.204	VALID
5	0.674	0.204	VALID
6	0.685	0.204	VALID
7	0.636	0.204	VALID

Sumber : Data Olahan SPSS versi 26 (2019)

**Tabel 5: Hasil Uji Validitas Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Item Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
1	0.675	0.204	VALID
2	0.792	0.204	VALID
3	0.817	0.204	VALID
4	0.717	0.204	VALID
5	0.832	0.204	VALID
6	0.672	0.204	VALID

Sumber : Data Olahan SPSS (versi 26), 2019

**Tabel 6: Hasil Uji Validitas Sistem Pengendalian Intern**

Item Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
1	0.725	0.204	VALID
2	0.808	0.204	VALID
3	0.683	0.204	VALID
4	0.737	0.204	VALID
5	0.765	0.204	VALID

Sumber: Data Olahan SPSS versi 26 (2019)

**Tabel 7: Hasil Uji Validitas Kualitas Informasi LKPD**

Item Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
1	0.598	0.204	VALID
2	0.650	0.204	VALID
3	0.665	0.204	VALID
4	0.716	0.204	VALID
5	0.757	0.204	VALID
6	0.718	0.204	VALID
7	0.652	0.204	VALID
8	0.726	0.204	VALID
9	0.711	0.204	VALID
10	0.656	0.204	VALID
11	0.669	0.204	VALID

Sumber: Data Olahan SPSS versi 26 (2019)

Berdasarkan hasil uji validitas dari seluruh item pertanyaan pada variabel penelitian menunjukkan bahwa nilai *pearson correlation* (r hitung) untuk setiap item pertanyaan lebih besar dari nilai r tabel yaitu 0.204. Hal ini berarti bahwa semua indikator/item pertanyaan yang digunakan dalam mengukur masing-masing variabel adalah valid dan dapat digunakan dalam analisis data selanjutnya.

#### 4.4. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan cara *one shot* dengan alat uji SPSS versi 26 dengan *cronbach alpha* > 0.70. Adapun hasil pengujian reliabilitas terhadap kuesioner penelitian pada masing-masing variabel ditampilkan dalam Tabel 8 berikut ini :

**Tabel 8: Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Sumber daya manusia	0.732	RELIABEL
Pemanfaatan teknologi informasi	0.837	RELIABEL
Sistem pengendalian intern	0.796	RELIABEL
Kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0.882	RELIABEL

Sumber : Data Olahan SPSS versi 26 (2019)

Berdasarkan Tabel 8 dapat dilihat bahwa seluruh variabel memiliki nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0.70, sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan item pertanyaan pada kuesioner penelitian memiliki tingkat keandalan yang baik dan dapat digunakan dalam analisis data selanjutnya. Untuk pengujian asumsi klasik seperti normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, dalam penelitian ini sudah memenuhi seluruh kriteria.

#### 4.5. Uji Regresi Linear Berganda

**Tabel 9: Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	12,177	3,722		3,272	,002
SUMBER DAYA MANUSIA	,295	,126	,219	2,348	,021
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	,206	,169	,124	1,223	,225
SISTEM PENGENDALIAN INTERN	,932	,208	,465	4,478	,000

Keterangan:

a. Dependent Variable: KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Sumber : Data Olahan SPSS versi 26 (2019)

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda pada Tabel 9, maka diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = 12.177 + 0.295X_1 + 0.206X_2 + 0.932X_3 + \epsilon$$

#### 4.6. Uji Signifikan T (Parsial)

Dalam penelitian ini uji signifikansi individual dilakukan dengan membandingkan T hitung dengan T tabel sebagaimana tersaji pada Tabel 10 berikut ini :

**Tabel 10: Hasil Uji Signifikansi Individual**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	12,177	3,722		3,272	,002
SUMBER DAYA MANUSIA	,295	,126	,219	2,348	,021
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	,206	,169	,124	1,223	,225
SISTEM PENGENDALIAN INTERN	,932	,208	,465	4,478	,000

a. Dependent Variable: KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Sumber : Data Olahan SPSS Versi 26 (2019)

### **H<sub>1</sub> : Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara individual, variabel sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sehingga H<sub>1</sub> diterima. Hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2.348 dan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1.987, sehingga  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dengan signifikansi 0.021 yang artinya lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 0.05. Pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah dilandasi dengan pemahaman akuntansi oleh aparatur/staff yang melaksanakan fungsi akuntansi/tatausaha keuangan dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, adanya pelatihan keahlian dan sosialisasi sesuai bidang pekerjaan juga mendukung terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang rutin mendapatkan pelatihan berupa seminar, diklat dan sosialisasi akan meningkatkan kemampuan dan keterampilan dari sumber daya manusia tersebut dalam pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya, semakin baik kualitas sumber daya manusia yang mengelola dan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah maka akan semakin baik pula kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Surastiani (2015), yang menyatakan bahwa sumber daya manusia yang paham akan akuntansi pemerintahan dan memiliki pengalaman pada pengelolaan keuangan daerah dibutuhkan untuk dapat menghasilkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah yang baik.

### **H<sub>2</sub> : Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara individual, variabel pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sehingga H<sub>2</sub> ditolak. Hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 1.223 dan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1.987, yang artinya  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dengan signifikansi 0.225 lebih besar dari taraf signifikansi sebesar 0.05 maka H<sub>2</sub> ditolak. Hal ini bisa terjadi dikarenakan teknologi informasi sebenarnya sudah memadai dengan contoh pembuatan sistem keuangan di pemerintah daerah yang sudah menggunakan teknologi informasi, namun hasil uji yang tidak berpengaruhnya pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan di SKPD Kabupaten Indragiri Hilir disebabkan ada faktor lain yang lebih dominan, seperti SDM yang harus lebih maksimal dalam mencapai kinerja yang lebih baik dalam menghasilkan kualitas informasi keuangan. Hal ini bisa di tingkatkan dengan memberikan pelatihan yang optimal kepada sumberdaya manusia yang bersangkutan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Surastiani (2015) yang menyatakan bahwa berapapun skor/nilai pemanfaatan teknologi informasi tidak mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah

daerah, hal tersebut disebabkan oleh sistem yang diterapkan belum sesuai yang diinginkan sehingga sistem masih mengalami kendala dalam penggunaannya dan belum mampu mendukung penyajian laporan keuangan yang andal.

**H<sub>3</sub> : Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara individual, variabel sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sehingga H<sub>3</sub> diterima. Hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 4.478 dan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1.987, yang artinya  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dengan signifikansi 0.000 lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 0.05 maka H<sub>3</sub> diterima. Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah dilandasi dengan adanya peraturan tertulis maupun tidak tertulis tentang *standart operating procedure* (SOP) pada masing-masing instansi Pemerintah Daerah. Peraturan tersebut mengendalikan seluruh sumber daya manusia yang bekerja pada instansi tersebut untuk bertindak disiplin dan tidak melakukan pelanggaran dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Jika terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan fungsi dan tugas maka aparat yang bersangkutan akan dikenakan tindakan disiplin dari masing-masing pimpinan dalam instansi pemerintah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Surastiani (2015), Tampaty (2017), Yeny & Poputra (2016), Latjandu, Kalangi & Tinangon (2016) serta Mahaputra & Putra (2014) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

**4.7. Uji Signifikansi Simultan ( Uji F)**

**Tabel 11: Hasil Uji Signifikansi Simultan**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	834,584	3	278,195	28,974	,000 <sup>b</sup>
Residual	854,535	89	9,602		
Total	1689,118	92			

A. Dependent Variable: Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

B. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Intern, Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi

Sumber : Data Olahan SPSS Versi 26 (2019)

**H<sub>2</sub> : Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara simultan, variabel sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sehingga H<sub>4</sub> diterima. Hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai  $F_{hitung}$  sebesar 28.974 dan nilai  $F_{tabel}$  sebesar 2.707, yang artinya  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dengan signifikansi 0.000 lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 0.05 maka H<sub>4</sub> diterima. Pengaruh seluruh variabel independen terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah dikarenakan apabila instansi pemerintah memiliki sumber daya yang memadai akan mendukung tercapainya tujuan instansi pemerintahan yaitu menciptakan akuntabilitas dan transparansi terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan informasi laporan keuangan yang berkualitas. Untuk membantu proses pengelolaan laporan keuangan pemerintah daerah menjadi lebih efisien dibutuhkan fasilitas berupa teknologi informasi yang memadai, fasilitas tersebut kemudian akan dioperasikan oleh sumber daya manusia pengelola laporan keuangan pemerintah daerah.

Sumber daya manusia yang memadai diharapkan mampu mengoperasikan sistem teknologi informasi yang tersedia dengan optimal sehingga mendukung terlaksananya pengelolaan laporan keuangan pemerintah daerah dengan efektif dan efisien. Selain itu, untuk mendukung terciptanya kualitas informasi pada laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan sistem pengendalian intern yang membatasi hak dan wewenang agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan fungsi dan tugas pengelola laporan keuangan pemerintah daerah.

#### 4.8. Koefisien Determinasi ( R Square)

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan suatu model regresi menerangkan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini tersaji pada Tabel 12 sebagai berikut :

**Tabel 12: Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate
1	,703 <sup>a</sup>	,494	,477		3,099

A. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Intern, Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi

B. Dependent Variable: Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

**Sumber** : Data Olahan SPSS Versi 26 (2019)

Berdasarkan hasil uji pada Tabel 12 diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (*Adjust R Square*) sebesar 0.477 atau sebesar 47.7%. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 47.7% kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dipengaruhi oleh sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern. Sedangkan sisanya sebesar 52.3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## 5. KESIMPULAN

Dari hasil pengujian, diketahui bahwa sumber daya manusia, pengendalian intern, berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Indragiri Hilir. Hal ini menunjukkan sumber daya manusia dan pengendalian intern yang memadai mampu mendukung terlaksananya pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan efektif dan efisien, dimana sistem pengendalian intern mampu membatasi hak dan wewenang agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan fungsi dan tugas pengelola Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pada pemanfaatan teknologi informasi juga sangat diperlukan walaupun dalam pembuktian hasil uji tidak berpengaruh. Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu penelitian ini hanya berfokus pada SKPD pemerintah daerah kabupaten Indragiri Hilir, dan tidak memasukkan SKPD yang ada di Kecamatannya. Sehingga tidak dapat dijadikan generalisasi untuk SKPD Pemerintah Daerah atau Kota lain yang ada di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

Aziz, A. (2012). Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan bisnis pos information technology utilization in business post development. *Buletin Pos dan Telekomunikasi*, 10(1).

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Sementara Semester I Tahun 2019*.

Bastian, I. (2001). *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.

Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *The Academy of Manajemen Review*, 14(1), 57-74.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm : Manajerial behavior, agency cost and ownership structure. *Journal Of Financial Economics*, 3(4).

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018*. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2018). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018*. Jakarta: Deputi Bidang SDM Aparatur.

Latjandu, I., Kalangi, L., & Tinangon, J.J. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerinah daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Accountability*, 5(2).

Mahaputra, I. P. U. R., & Putra, I. W. (2014). Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 8(2), 230 – 244.

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Marnis, & Priyono. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.

Mathis, R. L., & Jackson, J. H. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Pertama*. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 59. (2017). *Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24. (2005). *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56. (2005). *Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60. (2008). *Tentang Sistem Pengendalian Intern*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71. (2010). *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Standar Akuntansi Pemerintahan Republik Indonesia. (2019). *Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Edisi 2019*.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Surastiani, D. P. (2015). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 7(2), pp. 139-149.

Tampaty, M. R. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi kasus pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Bondowoso). (Skripsi Universitas Muhammadiyah Jember, Jawa Tengah, Indonesia).

Taufiqurokhman. (2009). *Mengenal Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12. (2018). *Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17. (2003). *Tentang Keuangan Negara*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32. (2004). *Tentang Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5. (2014). *Tentang Aparatur Sipil Negara*.

Yeny., K. H., & Poputra, A.T. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Teluk Wondama. *Jurnal EMBA*, 4(3), pp. 682-694.